

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kota merupakan suatu permukiman yang kecil dan lokasi yang sangat strategis. Pemukiman yang strategis dapat dilihat dari pembangunann-pembangunan yang semakin rapat, penduduk yang semakin bertambah dan semakin padat. Peningkatan jumlah penduduk dalam suatu perkotaan menimbulkan peningkatan akan kebutuhan sarana dan prasarana dan pemukiman yang terjadi. kondisi ini menimbulkan penambahan aktivitas kota dalam kegiatan sosial, ekonomi dan pergerakan arus transportasi.

Arus urbanisasi merupakan salah satu permasalahan pembangunan di perkotaan yang diakibatkan oleh ketimpangan laju pembangunan di kota dibandingkan dengan di desa. Hal ini ditunjukkan dengan kondisi sosial demografis di kawasan kumuh seperti kepadatan penduduk yang tinggi, kondisi lingkungan yang tidak layak huni, dan tidak memenuhi syarat serta minimnya fasilitas umum dan fasilitas sosial berupa fasilitas pendidikan, kesehatan dan sarana prasarana sosial budaya. Secara sosiologis permukiman kumuh adalah suatu permukiman yang tidak layak huni karena tidak memenuhi persyaratan untuk hunian baik secara teknis maupun non teknis, dengan gambaran dan kesan secara umum tentang masyarakat yang hidup dengan sikap dan tingkah laku yang rendah dilihat dari standar hidup dan penghasilan kelas menengah ke bawah. Hal tersebut menjadi interpretasi

umum bahwa masyarakat yang tinggal di kawasan permukiman kumuh adalah pemukim yang tinggal atau berada didalam suatu lingkungan yang rendah kualitasnya dengan belum terpenuhinya standar pelayanan minimal manusia untuk hidup dengan layak.

Dilihat dari sisi pemanfaatan ruang permukiman, permukiman kumuh diartikan sebagai permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat. Penggunaan ruang para permukiman kumuh tersebut seringkali berada pada suatu ruang yang tidak sesuai dengan fungsi aslinya sehingga berubah menjadi fungsi permukiman, seperti muncul kantung-kantung permukiman pada daerah sempadan untuk kebutuhan ruang terbuka hijau atau lahan-lahan yang tidak sesuai dengan peruntukannya (squatters). Keadaan demikian menunjukkan bahwa penghuninya kurang mampu untuk membeli dan menyewa rumah di daerah perkotaan dengan harga lahan/bangunan yang tinggi, sedangkan lahan kosong di daerah perkotaan sudah tidak ada. Permukiman tersebut muncul dengan sarana dan prasarana kurang memadai, kondisi rumah yang kurang baik dengan kepadatan yang tinggi serta mengancam kondisi kesehatan penghuni. Oleh karena itu permukiman yang berada di kawasan, sempadan sungai, sempadan rel kereta api, kolong jembatan tol dan sempadan situ/danau merupakan kawasan permukiman kumuh. Permasalahan permukiman kumuh perkotaan sering kali menjadi salah satu isu utama yang cukup menjadi polemik, sehingga seperti tidak pernah terkejar oleh upaya penanganan yang

dari waktu ke waktu sudah dilakukan. Masalah yang sarat muatan sosial, budaya ekonomi dan politik dengan serta merta mengancam kawasan-kawasan permukiman perkotaan yang nyaris menjadi laten dan hampir tak selesai ditangani dalam beberapa dekade. Secara khusus dampak permukiman kumuh juga akan menimbulkan paradigma buruk terhadap penyelenggaraan pemerintah, dengan memberikan dampak citra negatif akan ketidakberdayaan dan ketidakmampuan pemerintah dalam pengaturan pelayanan kehidupan hidup dan penghidupan warganya. Dilain sisi dibidang tatanan sosial budaya kemasyarakatan, komunitas yang bermukim di lingkungan permukiman kumuh secara ekonomi pada umumnya termasuk golongan masyarakat miskin dan berpenghasilan rendah, yang seringkali menjadi alasan penyebab terjadinya degradasi kedisiplinan dan ketidaktertiban dalam berbagai tatanan sosial masyarakat.

Pembangunan dan perumahan dan kawasan permukiman merupakan kegiatan yang bersifat multi sektor yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang perumahan dan kawasan Permukiman menyatakan bahwa Negara bertanggung jawab melindungi seluruh rakyat Indonesia melalui penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman, sehingga masyarakat dapat bertempat tinggal secara layak di lingkungan yang aman, sehat, harmonis, dan berkelanjutan. Seiring dengan perkembangan pembangunan perkotaan. Pertumbuhan dan pembangunan wilayah yang kurang memperhatikan kepentingan masyarakat dari berbagai kalangan, terutama masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), dapat

menimbulkan kesenjangan dan kesulitan bagi MBR dalam memperoleh rumah yang layak dan terjangkau. Isu tersebut harus menjadi perhatian bagi pemerintah daerah karena penyelenggaraan bidang perumahan dan kawasan permukiman merupakan salah satu urusan wajib pemerintah daerah.

Perkembangan pembangunan di Kota Jayapura sama halnya perkembangan pembangunan di perkotaan lain di Indonesia, sangat berpengaruh oleh pertumbuhan populasi manusia akibat perpindahan penduduk desa ke kota. Peningkatan di semua sektor pembangunan perkotaan yaitu pembangunan infrastruktur sarana dan parasarana kota yang memiliki daya tarik sendiri bagi masyarakat, yang mengakibatkan gelombang perpindahan penduduk desa ke kota semakin meningkat, sekaligus gaya dorong bagi para warga yang ingin memperoleh peluang kehidupan lebih baik atau menambah penghasilan ekonomi. Laju pembangunan itu pula yang menyebabkan perkembangan kota seolah tanpa arah dan terlihat kumuh.

Kota Jayapura diidamkan sebagai kota yang bersih dan indah sudah tidak ada lagi disebabkan karena banyaknya daerah yang berkesan kumuh seperti padat penduduk, yang ada di perumahan I,II,II dan IV Waena Kota Jayapura fenomena yang terjadi depan hotel frontone perumahan II waena dimana jalan raya dijadikan lahan parkir karena area parkir tidak mencukupi sehingga menyebabkan jalan sempit yang memicu kemacetan, adapun drainase sepanjang jalan raya perumahan II depan PLTD Waena tidak sesuai dengan tinggi ruas jalan bahkan untuk aliran air got yang sempit dan tertutup, mengakibatkan laju air drainase got tidak menampung volume air membuat

fenomena banjir saat hujan, bukan hanya banjir yang terjadi melainkan tidak terlihat indah sebab, banyak sampah yang ikut terbawa dan berserakan sepanjang jalan Raya di perumnas II ini. padat penduduk yang terjadi di sekitaran Waena akibat tingkat kepadatan bangunan, fenomena bangunan yang ada di sekitar Waena dimana rumah yang berdempetan, bangunan rumah yang sudah dibangun namun tidak ditempati, terbengkalai begitu saja. jika di pandang menjadi kumuh menjadi sampah

Dalam peningkatan kualitas kota, pemerintah Kota Jayapura telah menetapkan Kebijakan Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) untuk melakukan pembangunan rumah layak huni dan lingkungan layak bagi masyarakat yang dikategorikan masyarakat, kurang mampu ditinjau dari 7 indikator penting: 1) keteraturan bangunan gedung, 2) jalan lingkungan, 3) drainase lingkungan, 4) pengelolaan persampahan, 5) pengelolaan air limbah, 6) sistem penyediaan air minum, 7) proteksi kebakaran. Berbagai upaya yang terus dilakukan Pemerintah Kota Jayapura dalam rangka meningkatkan hidup masyarakat Kota Jayapura agar lebih baik untuk kedepannya, salah satunya dengan upaya Pemerintah untuk meningkatkan kualitas kota sehat, bersih, indah dan tanpa kumuh. Agar penyelenggaraan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman dapat berjalan optimal dan terorganisasi dengan baik, Kementerian Perumahan Rakyat mengeluarkan Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota. RP3KP merupakan

acuan operasional bagi seluruh pemangku kepentingan di bidang pembangunan perumahan dan kawasan permukiman. Adanya RP3KP dapat mendukung pengembangan perumahan dan kawasan permukiman yang terpadu, berkelanjutan dan sesuai dengan rencana tata ruang wilayah, mendukung penyediaan perumahan yang terjangkau dan layak huni, serta mewujudkan penyebaran penduduk yang proporsional.

Program KOTAKU di Kota Jayapura muncul pada tahun 2016 mendukung dalam terwujudnya permukiman perkotaan yang layak huni, produktif, dan berkelanjutan. Dipimpin oleh Pemerintah Daerah melalui koordinasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) yang berkolaborasi dengan pemangku kepentingan dan Organisasi Perangkat Daerah, dalam perencanaan implementasi dengan mengikutsertakan masyarakat dalam menjalankan program tersebut, sebagai program yang mampu menanggulangi kemiskinan dan permukiman kumuh di perkotaan.

Program Kota Tanpa Kumuh KOTAKU adalah program yang dilaksanakan secara nasional di 269 kota/kabupaten di 34 provinsi. Program ini merupakan satu dari sejumlah upaya strategis Direktorat Jendral Cipta Karya Kementerian PUPR, untuk mempercepat penanganan kumuh di Indonesia serta mendukung Gerakan 100-0-100% (100% akses air bersih, 0% luas kawasan kumuh perkotaan, 100% akses sanitasi). Fokus kegiatan program KOTAKU berdasarkan 7 indikator penting: 1) keteraturan bangunan gedung, 2) jalan lingkungan, 3) drainase lingkungan, 4) pengelolaan persampahan, 5) pengelolaan air limbah, 6) sistem penyediaan air minum, 7) proteksi kebakaran.

Tujuh indikator ini diatur pada Peraturan Menteri No 14 Tahun 2018 *Tentang Pencegahan dan peningkatan kualitas Terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh*

Berdasarkan dari pengamatan langsung kenyataan untuk mewujudkan kota tanpa kumuh bukanlah hal yang mudah. menurut (Purwanto, 2015, p. 15) Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat. Peningkatan kualitas terhadap perumahan dan permukiman kumuh dilakukan dengan meningkatkan kualitas bangunan, serta prasarana, sarana, dan utilitas umum. Kriteria perumahan dan permukiman kumuh ditinjau dari bangunan gedung, jalan lingkungan, penyediaan air minum, drainase lingkungan, pengelolaan air limbah, pengelolaan persampahan, dan proteksi kebakaran. Di mana masih saja ada kita jumpai rumah yang tidak layak huni hampir setiap sudut jalan. Tidak semua kawasan kumuh yang ada di kota Jayapura masuk dalam kegiatan Program KOTAKU dan program ini tidak menyeluruh tetapi terbatas hanya kawasan kumuh yang ditetapkan SK Wali Kota No 188.4/ 135 Tahun 2020; Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di kota Jayapura meliputi sejumlah 8 (*Delapan*) lokasi, di 3 (*Tiga*) Distrik; dengan luas total sebesar 39.67 ha (*Tiga Puluh Sembilan Koma Enam Puluh Tujuh Hektar*). Serta masih ada penghambat ketersediaan air bersih. Drainase yang keadaannya sudah rusak, Drainase yang sangat tertutup dan tidak luas yang menimbulkan air

tergenang di jalan saat hujan mengakibatkan banjir. Akibat tergenang air jalan menjadi kotor, limbah plastik dan sampah rumah tangga yang ikut terbawa membuat kawasan ruas jalan kumuh dan tidak indah. Jalan mengalami kekurangan material yang mengakibatkan rusaknya jalan.

Dalam tujuan Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) yaitu meningkatkan akses masyarakat terhadap infrastruktur dan pelayanan perkotaan pada kawasan kumuh sesuai dengan indikator kriteria kumuh yang telah ditetapkan. Namun masih saja ada jalan rusak, drainase yang sempit dan tertutup, sampah berserakan dan bangunan yang tidak ditempati menjadi bangunan yang tidak layak huni bagi masyarakat. Kenyataan tersebut, mendasari perlu adanya penelitian tentang *“Implementasi Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) Di Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Kota Jayapura”*.

B. Perumusan Masalah dan Pembatasan Masalah

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah dijelaskan diatas maka rumusan masalahnya yaitu :

1. Bagaimana Implementasi Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kota Jayapura ?
2. Apa faktor pendukung dan faktor penghambat dalam Implementasi Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kota Jayapura?

2. Pembatasan Masalah

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan batasan penelitian, pada implementasi program kota tanpa kumuh (KOTAKU) pada beberapa Apek atau Indikator :

1. Komunikasih
2. Sumber Daya
3. Disposisi
4. Struktur Birokrasi

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang akan menjadi target dalam penelitian yaitu :

1. Untuk mengetahui Implementasi Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) Di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kota Jayapura ?
2. Untuk mengetahui Apa faktor pendukung dan faktor penghambat dalam Implementasi Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) Di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kota Jayapura?

2. Kegunaan Penelitian

Penelitian di harapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis di antara sebagai berikut :

1. Kegunaan Secara Teoritis

Sebagai bahan merumuskan khasanailmu tetang implementasi program kota tanpa kumuh dan Sebagai bahan kajian untuk mengembangkan penelitian lebih lanjut tentang tentang Implementasi Program Kota Tanpa Kumuh.

2. Kegunaan Secara Praktis

Sebagai bahan bacaan masyarakat agar dapat berpartisipasi dalam setiap program yang diimplementasikan oleh pemerintah yang hakikatnya untuk kepentingan publik. Sebagai bahan masukan bagi pemerintah untuk tetap meningkatkan kinerja aparat pelayan publik.

D. Tinjauan Pustaka

Penulisan ini peneliti mencari referensi dari penelitian penelitian sebelumnya sebagai bahan perbandingan, baik mengenai kekurangan atau kelebihan yang sudah ada. Selain itu, peneliti juga mencari referensi dari buku-buku, skripsi, jurnal secara online untuk mendapatkan informasi tentang teori yang berkaitan dengan judul yang digunakan untuk memperoleh landasan Teori. Fokus dari penelitian ini adalah mengetahui bagaimana implementasi program kota tanpah kumuh yang sudah ada di Kota Jayapura.

- 1. Pengertian Kebijakan**

Apa itu kebijakan atau policy Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah serangkaian konsep dan asas yang menjadikan dasar rencana pelaksana kepemimpinan dan cara bertindak. konsep kebijakan memusatkan perhatiannya pda apa yang sebenarnya dilakukan dan bukan

pada apa usulkan atau dimasukan. Dalam (Winarno, 2002) menyarankan bahwa kebijakan hendaknya dipahami sebagai kegiatan yang berhubungan dengan konsekuensi konsekuensi bagi mereka yang bersangkutan secara langsung dengan keputusan Konsep Kebijakan merupakan serangkaian tindakan yang ditetapkan dan dilaksanakan oleh pemerintah yang berorientasi pada tujuan tertentu demi kepentingan masyarakat. James A. Anderson di tahun 1975 memfokuskan perhatiannya kepada kriteria pengambilan keputusan yang di gunakan para actor yaitu Nilai-nilai,afiliasi pertain politik,kepentingan konstituen,opini public,(proses administrasi) ds. Sedangkan Peterson dalam (Prof.Dr.Yeremias T.Keban, 2014) Berpendapat bahwa kebijakan secara umum dilihat sebagai aksi pemerintah dalam menghadapi masalah,dengan mengarahkan perhatian terhadap “siapa mendapat apa,kapan dan bagaimana”.

2. Ciri-ciri Kebijakan

Dalam menentukan Kebijakan harus mengetahui tentang Ciri-ciri Kebijakan Tersebut,Seperti :

- a. Orientasi pada tujuan suatu kebijakan sangat berarti jika dilihat dalam praktik politik dan kehidupan birokrasi di banyak Negara.
- b. Dalam bidang yang sama suatu kebijakan berhubungan dengan kebijakan yang terdahulu dan diikuti oleh kebijakan yang lain begitu seterusnya.
- c. Kebijakan pada dasarnya adalah pedoman untuk bertindak baik untuk melakukan maupun untuk tidak melakukan segala sesuatunya guna

mencapai Tujuan, sehingga diperlukan adanya keputusan peraturan dan pemerintah.

- d. Selain melarang dan menganjurkan, setiap lingkungan masyarakat juga terdapat kebijakan yang tidak bersifat melakukan dan juga tidak bersifat melarang,
- e. Didukung oleh suatu kekuasaan yang dapat memaksa masyarakat atau pihak terkait untuk mengindahkannya sebagai pedoman.

3. Pengertian Kebijakan Publik

Menurut Thomas R. Day kebijakan public dibatasi sebagai pilihan pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan (*whatever government choose to do or not to do*) (R. Day, 2005) Menurut buku kamus Administrasi Publik dikutip (Prof. Dr. Yermias T. Keban, 2014) kebijakan public adalah pemanfaatan yang strategis terhadap sumber-sumber daya yang ada untuk memecahkan masalah-masalah public atau pemerintah.

Dalam (Winarno, 2002) Kebijakan public adalah sebagai hubungan suatu unit pemerintah dengan lingkungannya. Kebijakan public merupakan rangkaian pilihan yang saling berhubungan di buat oleh badan dan pejabat pemerintahan yang diformulasikan di dalam bidang-bidang isu. Kebijakan public yang merupakan hasil dari pemerintah ini bersifat mengikat dan wajib ditaati dalam proses pelaksanaan dan harus ditegaskan di dalam daerah tersebut. Proses pembuatan kebijakan public merupakan proses yang perlu dikaji. Ada beberapa tahap kebijakan menurut Dunn sebagaimana dikutip Budi (Winarno, 2002) sebagai berikut :

a. Tahap Penyusunan Agenda

Sebelum permasalahan publik menjadi agenda publik, sebelumnya dipilih terlebih dahulu permasalahan yang harus cepat penangannya oleh pemerintah itu yang terlebih dahulu masuk menjadi agenda kebijakan. Pada tahap ini permasalahan yang masuk dipilih sesuai dengan tingkat terpenting dan diproses, sementara permasalahan yang dapat di tunda dikesampingkan terlebih dahulu setelah memproses permasalahan yang lebih penting.

b. Tahap Formulasi Kebijakan

Masalah yang telah masuk ke dalam agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah tersebut didefinisikan yang selanjutnya dicari pemecahan masalah tersebut didefinisikan yang selanjutnya dicari pemecahan masalah yang terbaik. Pemecahan masalah tersebut dipilih dari banyak pilihan alternatif pemecahan yang ada. Dalam tahap ini pembuat kebijakan bersaing dalam memberikan pilihan pemecahan masalah yang terbaik.

c. Tahap Adopsi Kebijakan

Dari beberapa alternatif pemecahan masalahnya kemudian dipilih pemecahan masalah yang terbaik yang telah mendapat persetujuan dari badan legislative, consensus antara direktur lembaga atau putusan pengadilan.

d. Tahap implementasi kebijakan

Pada tahap implementasi ini berbagai kepentingan saling bersaing. Beberapa implementasi dari kebijakan mendapatkan dukungan dari para pelaksana, namun ada juga kemungkinan mendapat pertentangan dari para pelaksana

e. Tahap Evaluasi Kebijakan

Dalam Tahap ini kebijakan yang dijalankan akan di nilai atau dievaluasi untuk melihat seberapa jauh kebijakan yang dibuat mendapatkan dampak yang diinginkan.oleh karena itu ditentukan kriteria kriteria yang menjadi dasar untuk menilai kebijakan public sudah mencapai dampak atau tujuan yang diharapkan atau belum.

4. Pengertian Implementasitasi

Implementasi merupakan salah satu tahapan dari serangkaian proses (siklus) suatu kebijakan. Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap sempurna. implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, dan tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem, implementasi bukan hanya sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.

5. Pengertian Implementasi Kebijakan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Implementasi adalah pelaksanaan,penerapan.Implementasi kebijakan merupakan proses kebijakan

adalah proses pelaksanaan keputusan kebijakan yang dibuat oleh lembaga pemerintah yang diarahkan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan dalam keputusan kebijakan tersebut. Keberhasilan implementasi menurut Merile S. Grindle (1980) dipengaruhi oleh dua variabel besar, yakni isi kebijakan (content of policy) dan lingkungan implementasi.

a) Variabel isi kebijakan ini mencakup :

- 1) Sejauh mana kepentingan kelompok sasaran termuat dalam isi kebijakan;
- 2) Jenis manfaat yang diterima oleh *target group*;
- 3) Sejauhmana perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan;
- 4) Apakah letak sebuah program sudah tepat. Sedangkan

b) Variabel lingkungan kebijakan mencakup :

1. Seberapa besar kekuasaan, kepentingan, dan strategi yang dimiliki oleh para actor yang terlibat dalam implementasi kebijakan;
2. Karakteristik institusi dan rejim yang sedang berkuasa;
3. Tingkat kepatuhan dan responsivitas kelompok sasaran.

Dalam rangka mengupayakan keberhasilan kebijakan maka tantangan-tantangan tersebut harus dapat teratasi sedini mungkin. Pada suatu sisi lain bahwa untuk mencapai keberhasilannya ada banyak variabel yang mempengaruhi implementasi kebijakan baik yang bersifat individual maupun kelompok atau institusi. Implementasi dari suatu program melibatkan upaya-upaya *policy maker* untuk mempengaruhi perilaku birokrat sebagai pelaksana agar bersedia memberikan pelayanan dan

mengatur perilaku kelompok sasaran. Dalam berbagai sistem politik, kebijakan public diimplementasikan oleh badan-badan pemerintah.

Kompleksitas implementasi bukan saja ditunjukkan oleh banyaknya actor atau unit organisasi yang terlibat, tetapi juga dikarenakan proses implementasi dipengaruhi oleh berbagai variabel yang kompleks, baik variabel yang individual maupun variabel organisasional, dan masing-masing variabel pengaruh tersebut juga saling berinteraksi satu sama lain.

Menurut Mulyadi adalah tindakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan. Implementasi kebijakan merupakan salah satu tindakan untuk mencapai tujuan. Menurut Van Meter dan Van Horn ada lima variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi yakni ; 1) standard an sasaran kebijakan 2) Sumber Daya 3)komonikasi antar organisasi dan penguatan aktivitas; 4) Karakteristik Agen Pelaksana; dan 5)kondisi sosisal ekonomi dan politik.

A. Mazmania dan P.A Sabatier (LESTARI, 2018) mengemukakan bahwa implementasi adalah apa yang sesungguhnya terjadi sesudah program dinyatakan terlaksana atau direncanakan merupakan faktor perhatian implementasi kebijakan, yaitu kejadian dan kegiatan yang muncul setelah diberlakukannya pedoman kebijakan Negara yang mencakup usaha untuk mengadminstrasikannya dan menimbulkan dampak atau akibat kepada masyarakat atau kegiatan dan program yang sedang atau akan dilakukan. Menurut Mazmanian dan Zabatier ini ada tiga

kelompok variabel yang mempengaruhi keberhasilan implementasi, yakni

: (1) karakteristik dari masalah ; karakteristik kebijakan / undang undang

(3) variabel lingkungan :

1) Karakteristik Masalah

Sifat masalah itu sendiri akan mempengaruhi mudah tidaknya suatu program yang diimplementasikan

2) Karakteristik Kebijakan

Kejelasan isi kebijakan, jelas dan rinci kebijakn akan mudah diimplemetasi karaena impelentor mudah memahami dan menerjemahkan dalam tindakan nyata.

3) Lingkungan Kebijakan

Kondisi sosial ekonomi masyarakat dan tingkat kemajuan teknologi dan tingkat komitmen dan ketrampilan dari aparat dan implementor.

Keberhasilan implementasi menurut Merile S. Grindle (1980) dipengaruhi oleh dua variabel besar, yakni isi kebijakan (content of policy) dan lingkungan implementasi.

a) Variabel isi kebijakan ini mencakup :

1. Sejauh mana kepentingan kelompok sasaran termuat dalam isi kebijakan;
2. Jenis manfaat yang diterima oleh *target group*;
3. Sejauhmana perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan;
4. Apakah letak sebuah program sudah tepat. Sedangkan

b) Variabel lingkungan kebijakan mencakup :

1. Seberapa besar kekuasaan, kepentingan, dan strategi yang dimiliki oleh para actor yang terlibat dalam implementasi kebijakan;
2. Karakteristik institusi dan rejim yang sedang berkuasa; tingkat kepatuhan dan responsivitas kelompok sasaran.

Proses implementasi sebagai tindakan tindakan yang dilakukan baik oleh individu / Pejabat-pejabat / kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan.

Dari Berbagai pendapat diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa implementasi kebijakn adalah suatu kegiatan untuk melaksanakan, menerapkan dan menjalankan kebijakan, yang ditujukan kepada public atau masyarakat, untuk mewujudkan tujuan kebijakan tersebut. Dalam sebuah implementasi program tentu ada faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan dalam sebuah pelaksanaan. Edward III dalam mengatakan bahwa ada empat faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan yakni komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Edward menjelaskan bahwa keempat variabel yang mempengaruhi implementasi saling berinteraksi satu sama lain. Faktor-faktor yang berpengaruh dalam implementasi menurut GeorgeC. Edwards III sebagai berikut :

a. Komunikasi

Implementasi akan berjalan efektif apabila ukuran-ukuran dan tujuan-tujuan kebijakan dipahami oleh individu-individu yang bertanggungjawab dalam pencapaian tujuan kebijakan. Kejelasan ukuran dan tujuan kebijakan dengan demikian perlu dikomunikasikan secara tepat dengan para pelaksana. Konsistensi atau keseragaman dari ukuran dasar dan tujuan perlu dikomunikasikan sehingga implementor mengetahui secara tepat ukuran maupun tujuan kebijakan itu. Komunikasi dalam organisasi merupakan suatu proses yang amat kompleks dan rumit. Seseorang bisa menahannya hanya untuk kepentingan tertentu, atau menyebar luaskannya. Di samping itu sumber informasi yang berbeda juga akan melahirkan interpretasi yang berbeda pula. Agar implementasi berjalan efektif, siapa yang bertanggung jawab melaksanakan sebuah keputusan harus mengetahui apakah mereka dapat melakukannya. Sesungguhnya implementasi kebijakan harus diterima oleh semua personel dan harus mengerti secara jelas dan akurat mengenai maksud dan tujuan kebijakan. Jika para aktor pembuat kebijakan telah melihat ketidakjelasan spesifikasi kebijakan sebenarnya mereka tidak mengerti apa sesungguhnya yang akan diarahkan. Para implementor kebijakan bingung dengan apa yang akan mereka lakukan sehingga jika dipaksakan tidak akan mendapatkan hasil yang optimal. Tidak cukupnya komunikasi kepada para implementor.

b. Sumber daya

Kebijakan perlu didukung oleh sumber daya, baik itu sumber daya manusia maupun sumber daya non-manusia.

Peraturan Menteri No 14 Tahun 2018 *Tentang Pencegahan dan peningkatan kualitas Terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh* serta pemberdayaan dengan memperhatikan kepentingan umum, keamanan, ketertiban, kebersihan lingkungan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan

c. Disposisi atau Sikap Pelaksana

Salah satu faktor yang mempengaruhi efektifitas implementasi kebijakan adalah sikap implementor. Jika implementor setuju dengan bagian-bagian isi dari kebijakan maka mereka akan melaksanakan dengan senang hati tetapi jika pandangan mereka berbeda dengan pembuat kebijakan maka proses implementasi akan mengalami banyak masalah. Ada tiga bentuk sikap/respon implementor terhadap kebijakan kesadaran pelaksana, petunjuk/arahan pelaksana untuk merespon program kearah penerimaan atau penolakan, dan intensitas dari respon tersebut. Para pelaksana mungkin memahami maksud dan sasaran program namun seringkali mengalami kegagalan dalam melaksanakan program secara tepat karena mereka menolak tujuan yang ada didalamnya sehingga secara sembunyi mengalihkan dan menghindari implementasi program Disamping itu dukungan para pejabat pelaksana sangat dibutuhkan dalam mencapai sasaran program.

Dukungan dari pimpinan sangat mempengaruhi pelaksanaan program dapat mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Wujud dari dukungan pimpinan ini adalah Menempatkan kebijakan menjadi prioritas program, penempatan pelaksana dengan orang-orang yang mendukung program, memperhatikan keseimbangan daerah, agama, suku jenis kelamin dan karakteristik demografi yang lain. Disamping itu penyediaan dana yang cukup guna memberikan insentif bagi para pelaksana program agar mereka mendukung dan bekerja secara total dalam melaksanakan kebijakan/program.

d. Struktur Birokrasi

Membahas badan pelaksana suatu kebijakan, tidak dapat dilepaskan dari struktur birokrasi. Struktur birokrasi adalah karakteristik, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi berulang-ulang dalam badan-badan eksekutif yang mempunyai hubungan baik potensial maupun nyata dengan apa yang mereka miliki dalam menjalankan kebijakan. Van Horn dan Van Meter menunjukkan beberapa unsur yang mungkin berpengaruh terhadap suatu organisasi dalam implementasi kebijakan, yaitu:

- 1) Kompetensi dan ukuran staf suatu badan;
- 2) Tingkat pengawasan hirarkhis terhadap keputusan-keputusan sub unit dan proses-proses dalam badan pelaksana;
- 3) Sumber-sumber politik suatu organisasi (misalnya dukungan diantara anggota legislative dan eksekutif,

- 4) Vitalitas suatu organisasi;
- 5) Tingkat komunikasi terbuka" yaitu jaringan kerja komunikasi horizontal maupun vertikal secara bebas serta tingkat kebebasan yang secara relative tinggi dalam komunikasi dengan individu-individu di luar organisasi;
- 6) Kaitan formal dan informal suatu badan dengan badan pembuat keputusan atau pelaksana keputusan.

6. Program KOTAKU

Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) merupakan salah satu upaya strategis Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk mempercepat penanganan permukiman kumuh di perkotaan dan mendukung “**Gerakan 100-0-100**”, yaitu **100 persen akses air minum layak, 0 persen permukiman kumuh, dan 100 persen akses sanitasi layak**. Program Kotaku dalam pelaksanaannya menggunakan platform kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kota/kabupaten, masyarakat dan stakeholder lainnya dengan memposisikan masyarakat dan pemerintah kabupaten/kota sebagai pelaku utama (nakhoda).

Implementasi pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh, dimulai dari tahap (a) pendataan; (b) perencanaan; (c) pelaksanaan, (d) pemantauan dan evaluasi dan (e) keberlanjutan. Setiap tahapan dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan masyarakat (LKM/BKM), pemerintah kabupaten/kota dan pemangku kepentingan

lainnya (stakeholder). Disadari bahwa kegiatan pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh berkaitan erat dengan masyarakat dan sebagai implementasi dari prinsip bahwa pembangunan yang dilakukan (termasuk pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh) tidak boleh merugikan masyarakat, maka dalam pelaksanaan Program Kotaku selalu menerapkan penapisan (pengamanan) lingkungan dan sosial (environment and social safeguard).

Sumber pembiayaan Program Kotaku berasal dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, swadaya masyarakat dan pemangku kepentingan lainya (stakeholder) serta dari lembaga mitra pembangunan pemerintah (World Bank-WB; Asian Infrastructure Investment Bank-AIIB dan Islamic Development Bank-IsDB). Berdasarkan kebutuhan total pembiayaan, sumber dari mitra pembangunan pemerintah (Loan) sekitar 45%.

Tujuan umum program ini adalah meningkatkan akses terhadap infrastruktur dan pelayanan dasar di permukiman kumuh perkotaan dan mencegah timbulnya permukiman kumuh baru dalam rangka untuk mendukung terwujudnya permukiman perkotaan yang layak huni, produktif, dan berkelanjutan. Untuk mewujudkan tujuan diatas, dilakukan melalui kegiatan:

- a. Pembangunan/rehabilitasi infrastruktur permukiman baik skala lingkungan maupun skala kawasan;
- b. Penguatan kapasitas masyarakat dan pemerintah daerah serta

- c. Pembangunan infrastruktur pendukung penghidupan masyarakat.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan Dan Kawasan Permukiman. Pasal 1 Dalam yang dimaksud dengan :

1. Perumahan dan kawasan permukiman adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas pembinaan, penyelenggaraan perumahan, penyelenggaraan kawasan permukiman, pemeliharaan dan perbaikan, pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh, penyediaan tanah, pendanaan dan sistem pembiayaan, serta peran masyarakat.
2. Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni.
3. Kawasan permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan, yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.
4. Lingkungan hunian adalah bagian dari kawasan permukiman yang terdiri atas lebih dari satu satuan permukiman.
5. Permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana,

utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan perdesaan.

6. Penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman adalah kegiatan perencanaan, pembangunan, pemanfaatan, dan pengendalian, termasuk di dalamnya pengembangan kelembagaan, pendanaan dan sistem pembiayaan, serta peran masyarakat yang terkoordinasi dan terpadu.
7. Permukiman kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat.
8. Perumahan kumuh adalah perumahan yang mengalami penurunan kualitas fungsi sebagai tempat hunian.
9. Pendanaan adalah penyediaan sumber daya keuangan yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan/atau sumber dana lain yang dibelanjakan untuk penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau setiap pengeluaran yang akan diterima kembali untuk kepentingan penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman baik yang berasal dari dana masyarakat, tabungan perumahan, maupun sumber dana lainnya.

11. Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan hunian yang memenuhi standar tertentu untuk kebutuhan bertempat tinggal yang layak, sehat, aman, dan nyaman.
12. Sarana adalah fasilitas dalam lingkungan hunian yang berfungsi untuk mendukung penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi.

Sesuai dengan *Permen PUPR No. 14 tahun 2018* Tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh, yang terdiri dari **6 aspek dan 16 kriteria permukiman kumuh** adalah sebagai berikut :

1. Kondisi Bangunan Gedung
 - Ketidakteraturan bangunan;
 - Tingkat kepadatan bangunan yang tinggi yang tidak sesuai dengan ketentuan rencana tata ruang; dan/atau
 - Kualitas bangunan yang tidak memenuhi syarat
2. Kondisi Jalan Lingkungan
 - Jaringan jalan lingkungan tidak melayani seluruh lingkungan Perumahan atau Permukiman; dan/atau
 - Kualitas permukaan jalan lingkungan buruk.
3. Kondisi Penyediaan Air Minum
 - Akses aman air minum tidak tersedia; dan/atau
 - Kebutuhan air minum minimal setiap individu tidak terpenuhi

4. Kondisi Drainase Lingkungan

- Drainase lingkungan tidak tersedia;
- Drainase lingkungan tidak mampu mengalirkan limpasan air hujan sehingga menimbulkan genangan; dan/atau
- Kualitas konstruksi drainase lingkungan buruk

5. Kondisi Pengelolaan Air Limbah

- Sistem pengelolaan air limbah tidak memenuhi persyaratan teknis; dan/atau
- Prasarana dan sarana pengelolaan air limbah tidak memenuhi persyaratanteknis

6. Kondisi Pengelolaan Persampahan

- Prasarana dan sarana persampahan tidak memenuhi persyaratan teknis; dan/atau
- Sistem pengelolaan persampahan tidak memenuhi persyaratan teknis.
- Kondisi Pengamanan (Proteksi) Kebakaran
- Prasarana proteksi kebakaran tidak tersedia; dan
- Sarana proteksi kebakaran tidak tersedia.

Tahapan Implementasi Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dimulai dari tahap

- a) Pendataan
- b) Perencanaan
- c) Pelaksanaan

- d) Pemantauan dan evaluasi dan
- e) Keberlanjutan.

Setiap tahapan dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan masyarakat, pemerintah kabupaten/kota dan pemangku kepentingan lainnya (stakeholder). Disadari bahwa kegiatan pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh berkaitan erat dengan masyarakat dan sebagai implementasi dari prinsip bahwa pembangunan yang dilakukan (termasuk pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh) tidak boleh merugikan masyarakat, maka dalam pelaksanaan Program Kotaku selalu menerapkan pengamanan lingkungan dan social.

E. Defenisi Variabel

Variable yang diteliti adalah implementasi yang dapat dilihat dari definisi konsep dan definisi operasional sebagai berikut :

1. Definisi Konsep

Konsep implementasi adalah melaksanakan keputusan yang dibuat oleh lembaga pemerintah yang diarahkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan kebijakan. Konsep implementasi berasal dari bahasa inggris yaitu *to implement*. Dalam kamus besar webster, *to implement* (mengimplementasikan) menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu (untuk menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu).Maka penulis dapat menyerderhadakan suatu pemikiran yang bersifar abstrak dari kejadian yang diamati sebagai variabel konsep yaitu :

implementasi merupakan tindakan pelaksana kebijakan untuk mencapai Tujuan kebijakan itu sendiri.

2. Defenisi Operasional

Definisi operasional merupakan penetapan dari indikator-indikator yang akan di pelajari dan di analisa, sehingga nantinya dapat diperoleh gambaran yang jelas, penelitian ini membahas tentang implementasi Program KOTAKU. program ini bermaksud membangun penanganan kumuh di mana pemerintah daerah memimpin dan berkolaborasi dengan pemangku kepentingan dalam perencanaan implementasi dalam mengedepankan pasrtisipasi masyarakat. Focus penelitian ini mengarah kepada impelentor atau aparaturnya Program KOTAKU. Maka penulis mengambil kriteri dari Model pendekatan implementasi kebijakan yang di kemukakan oleh George Edward III (1980) menunjukan empat variabel yang berperan penting dalam pencapaian keberhasilan implementasi. variabel variabel tersebut sebagai Berikut :

a. Komunikasi

Komunikasi menunjukan setiap kebijakan dapat dilaksanakan dengan baik jika terjadi komunikasi efektif antara pelaksana program (aparat kantor dinas PUPR Kota Jayapura) dengan para kelompok sasaran (target group), terkait dengan pelaksanaan Program KOTAKU. Tujuan dan sasaran dari program dapat di sosialisasikan secara baik sehingga dapat menghindari adanya distorsi atas kebijakan dan program. Ini menjadi penting karena semakin tinggi pengetahuan

kelompok sasaran atas program maka akan mengurangi tingkat penolakan dan kekeliruan dalam mengaplikasikan program dan kebijakan dalam ranah yang sesungguhnya dengan indikator-indikator yang dapat diukur antara lain :

- Komunikasi antar pelaksana
- Media komunikasi yang digunakan
- Konsistensi petunjuk dan perintah pelaksana.

b. Sumber Daya

Tercapainya program KOTAKU harus adanya kebijakan. setiap kebijakan harus didukung oleh sumber daya yang memadai, baik sumber daya manusia maupun sumber daya finansial. Sumber daya manusia adalah kecukupan baik kualitas maupun kuantitas implementor yang dapat melingkupi seluruh kelompok sasaran. Sumber daya finansial adalah kecukupan modal atas sebuah program/kebijakan. Keduanya harus diperhatikan dalam implementasi program/kebijakan pemerintah. Sebab tanpa kehandalan implementor, kebijakan menjadi kurang enerjik dan berjalan lambat dan seadanya. Sedangkan sumber daya finansial menjamin keberlangsungan program/kebijakan. melaksanakan program yang dimiliki implementor / staf pelaksana program KOTAKU di kantor dinas PUPR Kota Jayapura, dengan indikator indikator yang dapat diukur antara lain :

- Ketersediaan dan kecakupan informasi tentang pelaksanaan program KOTAKU

- Kualitas staf pelaksana yang tersedia (keahlian dan kemampuan untuk melaksanakan program KOTAKU)
- Kecukupan dan kelancaran anggaran
- Kewenangan yang jelas bagi tiap-tiap staf dalam mengimplementasikan program

c. Disposisi

Disposisi menunjukkan karakteristik yang menepel erat kepada implementor kebijakan program KOTAKU. Sikap pelaksana adalah kemauan niat para pelaksana untuk melaksanakan kebijakan. Karakter yang penting dimiliki oleh implementor adalah kejujuran, komitmen, dan demokratis. Implementor yang memiliki komitmen tinggi dan jujur akan senantiasa bertahan diantara hambatan yang ditemui dalam program/kebijakan. Kejujuran mengarahkan implementor untuk berada dalam arus program yang telah di gariskan dalam quedeline program. Komitenen dan kejujuran membawanya semakin antusias dalam melaksanakan tahap-tahap program secara konsisten. Sikap yang demokratis akan meningkatkan kesan baik implementor dan kebijakan dihadapkan anggota kelompok sasaran. Sikap ini akan menurunkan resistensi dari masyarakat dan menumbuhkan rasa percaya dan kepedulian kelompok sasaran terhadap implementor dan program/kebijakan. Dalam ahal ini implementor/staf pelaksana program KOTAKU di Kantor dinas PUPR Kota Jayapura dengan indicator indicator dapat diukur antara lain :

- Pemahaman Aparat Pelaksana terhadap Pelaksanaan program
- Arahan dan tanggapan aparat pelaksana terhadap kebijakan atau program
- Kemauan dan kemampuan aparat pelaksana untuk melaksanakan kebijakan program

d. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi menjadi penting dalam implementasi kebijakan merupakan sistem. Aspek struktur birokrasi ini mencakup dua hal penting : pertama mekanisme dan kedua Struktur organisasi pelaksana. Mekanisme, implementasi program biasanya sudah ditetapkan melalui standar operasional prosedur (SOP) yang dicantumkan dalam guideline program/kebijakan SOP yang baik mencantumkan kerangka kerja yang jelas, sistematis, tidak berbelit dan mudah dipahami oleh siapapun karena akan menjadi acuan dalam berkerjanya implementor. Sedangkan struktur organisasi pelaksana harus dapat menjamin adanya pengambilan keputusan atas kejadian luar biasa dalam program secara cepat. Dengan indikator-indikator yang dapat diukur antara lain :

- Prosedur Kerja dan Pengaturan Mekanisme kerja pelaksana Program atau kebijakan.
- Perubahan dalam prosedur kerja dan pengaturan mekanisme kerja pelaksana program atau kebijakan.

F. Metode Penelitian

Metode Penelitian yang digunakan adalah metode Penelitian kualitatif bertujuan untuk membuat gambaran atau memeberikan informasi secara sistematis dan akurat berdasarkan fakta yang ada. (Syafnidawati, 2020) :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif yang bersifat deskriptif dengan maksud yaitu memberikan gambaran masalah secara sistematis, cermat, rinci dengan menuliskan keadaan subjek atau objek penelitian berdasarkan fakta fakta yang ada di lapangan.

2. Lokasi Penelitian

Tempat Penelitian akan di laksanakan di kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kota Jayapura

3. Informan Penelitian

Informan penelitian adalah subjek, Implementor, aktor aktor kebijakan yang dapat memberikan informasi mengenai fenomena atau permasalahan yang diangkat dalam penelitian.

Tabel 1.1 Informan Penelitian

No.	Informan Penelitian
1.	Wali Kota Jayapura / BAPPEDA
2.	Kelompok Kerja PUPR (Pokja PKP)

4. Teknik Pengumpulan Data

Proses pengumpulan data harus memiliki cara atau teknik untuk mendapatkan data atau informasi yang baik berstruktur serta akurat dari setiap apa yang diteliti sehingga informasi dapat diperoleh dan dapat

dipertanggung jawabkan, maka ada beberapa teknik pengumpulan data sebagai berikut :

a. Wawancara

Merupakan teknik pengumpulan data untuk memperoleh informasi melalui Tanya jawab secara langsung dengan nara sumber atau responden yang di teliti untuk memperoleh data yang di perlukan.dalam wawancara juga menggunakan alat bantu komunikasi yaitu telepon dan alat elektronik lainnya.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan salah satu cara pengumpulan data yang mencatat,catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, sehingga akan diperoleh data yang lengkap,sah dan bukan berdasarkan perkiraan,juga mengambil sumber sumber yang tertulis dan yang ada,baik berupa dokumen atau arsip.

c. Observasi

Observasi adalah ruang,pelaku, kegiatan, objek, perbuatan. Kejadian atau peristiwa waktu dan prasarana.Alasan peneliti melakukan observasi adalah menyayikan gambaran realistic perilaku atau kejadian untuk menjawab pertanyaan untuk membantu mengerti perilaku manusia dan untuk melakukan evaluasi terhadap pengukuran.

5. Penelitian Pustaka

Penelitian pustaka adalah penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data melalui dokumen dokumen tertulis, laporan-laporan,

serta peraturan perundang-undangan yang erat kaitannya dengan penelitian ini. Dan mengunjungi perpustakaan

6. Teknik Pengolahan Data

Data-data yang sudah tergali dan terkumpul, maka langkah selanjutnya mengolah data tersebut menggunakan teknik teknik msebagai berikut :

- a. Editing (Pemeriksaan Data) Editing adalah meneliti data-data yang telah diperoleh, terutama dari kelengkapan jawaban, keterbacaan tulisan, kejelasan makna, kesesuaian dan relevansinya dengan data yang lain. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan proses editing terhadap hasil data obesrvasi, wawancara, dan dokumen terkait Program Kota Tambah Kumu di Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Kota Jayapura.
- b. Classifying (Klasifikasi) Classifying adalah proses pengelompokan semua data baik yang berasal dari hasil wawancara dengan subyek penelitian, pengamatan dan pencatatan langsung di lapangan atau observsi. Seluruh data yang didapat tersebut dibaca dan ditelaah secara mendalam, kemudian digolongkan sesuai kebutuhan. Hal ini dilakukan agar data yang telah diperoleh menjadi mudah dibaca dan dipahami, serta memberikan informasi yang objektif yang diperlukan oleh peneliti. Kemudian data-data tersebut dipilah dalam bagian-bagian yang memiliki persamaan berdasarkan data yang diperoleh pada saat wawancara dan observasi serta data yang diperoleh dari dokumen.

- c. Verifying(Verifikasi) Verifying adalah proses memeriksa data dan informasi yang telah didapat dari lapangan agar validitas data dapat diakui dan digunakan dalam penelitian.
- d. Concluding (Kesimpulan) Selanjutnya adalah kesimpulan, yaitu adalah langkah terakhir dalam proses pengolahan data. Kesimpulan inilah yang nantinya akan menjadi sebuah data terkait dengan objek penelitian peneliti. Hal ini disebut dengan istilah concluding, yaitu kesimpulan atas proses pengolahan data yang terdiri dari tiga proses sebelumnya: editing, classifying, dan verifying.

7. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan yaitu analisis dengan menggunakan metode penelitian kualitatif Deskriptif yaitu penganalisan yang bersifat menjelaskan dan menguraikan data dan informasi yang diperoleh dan dikaitkan dengan teori-teori yang relevan dan kemudian untuk diambil sebagai pedoman penyusunan dalam penelitian. Untuk mengetahui Bagaimana Implementasi Program Kota Tanpa Kumuh di Kota Jayapura berdasarkan kenyataan dilapangan dan hasilnya akan disajikan dengan teori teori keterangan yang mendukung untuk menjawab masalah serta memberikan hasil yang relevan dan diambil kesimpulan.

Proses Analisis Data Dalam Model Miles dan Huberen dalam (Ami, 2019) sebagai berikut :

- a. Pengumpulan Data Dalam proses pengambilan data dapat juga sekaligus dilakukan analisis data. Datanya adalah segala sesuatu yang

dilihat, didengar dan diamati. Data yang diperoleh bukan merupakan data akhir yang akan dapat langsung dianalisis untuk menarik suatu kesimpulan akhir.

- b. Reduksi Data Tahap ini berlangsung terus menerus sejalan pelaksanaan penelitian berlangsung. Dimaksudkan untuk lebih menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang data yang tidak diperlukan dan mengorganisasikannya.
- c. Penyajian Data Penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dengan mencermati penyajian data, peneliti lebih mudah memahami apa yang terjadi dan apa yang harus dilakukan. Bentuk data yang disajikan dapat berupa bagan, uraian singkat, grafik, chart atau tabel.
- d. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi Berdasarkan data yang telah direduksi dan disajikan, peneliti membuat kesimpulan yang didukung dengan bukti yang kuat pada tahap pengumpulan data. Kesimpulan adalah jawaban dari rumusan masalah dan pertanyaan yang telah diungkapkan oleh peneliti sejak awal.